

PILKADA SUKOHARJO 2020 EA dan Joswi Siap Debat

SUKOHARJO (KR) - Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Etik Suryani-Agus Santosa (EA) nomor urut 1 dan Joko Santosa-Wiwaha Aji Santoso (Joswi) nomor urut 2 siap tampil dalam debat pertama Pilkada 2020, Sabtu (17/10).

Kegiatan ini rencananya disiarkan secara langsung melalui televisi lokal dan media sosial. Debat tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus korona, sedangkan para pendukung diminta mendampingi acara tersebut.

Ketua Tim Pemenangan pasangan EA, Wawan Pribadi mengatakan, tidak ada persiapan khusus dilakukan pasangan EA dalam menghadapi agenda debat pertama Pilkada 2020.

Sebab, debat hanya akan memaparkan visi dan misi masing-masing pasangan calon. "Tidak ada persiapan khusus, pasangan calon bupati dan wakil bupati EA tetap siap mengikuti agenda debat Pilkada 2020," ungkapnya, Jumat (16/10).

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan pasangan Joswi, Eko Sapto Purnomo juga menyatakan kesiapan menghadapi debat pertama Pilkada 2020 ini. "Agenda debat hanya paparan visi dan misi. Dengan papara, diharapkan masyarakat bisa mengetahui visi dan misi calon pemimpin mereka.

Menurut Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda, debat merupakan tahapan yang harus digelar. Tahapan ini telah disosialisasikan kepada dua pasangan calon peserta Pilkada Sukoharjo 2020. (Mam)

JUALAN DI ALUN-ALUN WONOGIRI 110 PKL Jalani Tes Swab

WONOGIRI (KR) - Sekitar 110 pedagang kaki lima (PKL) anggota Paguyuban Pedagang Alun-alun Giri Krida Bhakti Wonogiri, Jumat (16/10), menjalani tes swab.

Acara yang digelar Satgas Covid 19 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri itu sebagai realisasi surat permohonan ketua paguyuban PKL, Supriyono yang ingin membuka lapak mereka kembali. Namun dari 110 pedagang tersebut, ada 35 PKL yang belum menjalani tes swab karena tidak hadir.

PLT Bupati Wonogiri Edy Santosa SH MH didampingi Kepala Dinkes Wonogiri dr Adhi Dharma MKes menyebutkan, ada 110 PKL yang saban hari berjualan di sekitar Alun-alun Wonogiri yang minta dites swab. "Apakah permintaan untuk berjualan lagi itu dipenuhi, kita lihat dulu hasilnya swab," kata Edy yang juga Wabup Wonogiri.

Menurut Plt Bupati, selain ada monitoring dan pengawasan ketat dari Satgas Covid Wonogiri, di internal paguyuban PKL juga membentuk tim khusus (timsus). "Timsus PKL inilah yang nanti merekomendasi setiap anggotanya layak untuk berjualan apa tidak," tandasnya. (Dsh)

SEMUA WILAYAH INDONESIA AKAN TERDAMPAK

La Nina Bisa Timbulkan Bencana

TEMANGGUNG (KR) - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwi Koritakarnawati mengatakan sebagian besar wilayah Indonesia akan terkena dampak anomali iklim La Nina, yang terjadi pada musim hujan.



KR-Zaini Arrosyid

Bupati Temanggung dan Kepala BMKG meninjau bibit tembakau hasil SLI.

Berdasar prakiraan, hanya Sumatera yang dimungkinkan tidak terdampak. Tetapi curah hujan di Indonesia tetap

saja tinggi, sehingga ada potensi bencana seperti banjir dan longsor.

Kepala BMKG Dwi Koritakarnawati mengun-

gkapkan hal itu saat menutup Sekolah Lapang Iklim (SLI) di Temanggung, Kamis (15/10).

Menurutnya, dampak La Nina ditandai dengan meningkatnya curah hujan 20-40 persen dari curah hujan normal.

"Fenomena ini terjadi karena suhu permukaan laut Samudra Pasifik lebih dingin, yakni mendekati -1 derajat Selsius. Sementara suhu permukaan laut di Indonesia, yang kemudian menimbulkan curah hujan lebih tinggi," jelas-

nya.

Puncak La Nina diperkirakan antara Desember 2020 sampai Januari 2021. Tanaman pangan juga akan terdampak sehingga semua pihak harus waspada terhadap komoditas pertanian dan perkebunan.

Kepala BMKG Semarang, Tuban Wiyoso menyebutkan, wilayah Jawa Tengah yang berpotensi terdampak La Nina ada di wilayah selatan, seperti Purworejo, Kebumen, Cilacap dan di wilayah tengah yakni Wonosobo dan Banjarnegara, dengan peningkatan curah hujan 20 persen.

"Temanggung juga nyaris terkena, namun curah hujan tetap tinggi," ungkapnya.

Dalam kaitan Sekolah

Lapang Iklim, perwakilan petani, Robin Ekajaya mengatakan telah ada pergeseran petani dalam menanam padi, dari penggunaan ilmu titen menjadi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Penggunaan ilmu pengetahuan terbukti mampu menjawab tantangan, sehingga hasil tembakau tahun ini bagus, tetap muncul srinthil gred G dan H," jelasnya.

Menurut Temanggung, Al Khadziq, SLI sangat dibutuhkan petani karena terbukti mampu menyiasati cuaca dan iklim sehingga hasil panen bagus.

"Hasil dari SLI harus dapat diterapkan dan disebarluaskan kepada petani lainnya," tandasnya. (Osy)

TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT

'Sabilurrosyad' Cegah Klaster Baru

KENDAL (KR) - Tiga pondok pesantren (Ponpes) di Kendal yang menjadi klaster penyebaran Covid-19 menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak. Dari tiga Ponpes tersebut, 92 santri terpapar dan terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini membuat sejumlah ponpes di Kendal berupaya menghindari pandemi Covid-19. Salah satunya, Ponpes Sabilurrosyad.

Susmeiati, Ketua Yayasan Pendidikan Amanah Sabilurrosyad di Desa Bojoggede Kecamatan Ngampel menjelaskan, protokol

kesehatan diterapkan dengan sangat ketat sejak santri kembali belajar tatap muka. "Meskipun berat, kami harus terapkan," tegasnya, Jumat (16/10).

Menurutnya, protokol kesehatan diterapkan sejak dari pintu masuk. Semua tamu dan santri serta pengajar harus melalui pintu disinfektan. "Prosedur 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, benar-benar diterapkan," tandas Susmeiati.

Terpisah, Kapolsek Pegandon Iptu Agus Supriyadi mengatakan pihak-

nya secara rutin melakukan pemantauan pondok pesantren di wilayahnya. Hal itu dilakukan agar klaster Ponpes tidak tercipta dan kasus Covid zero. "Sejak Maret lalu, kami jajaran Polsek Pegandon terus memberikan edukasi memutus rantai penyebaran Covid 19. Selain membentuk komunitas Siaga Candi Covid-19, juga menggelar operasi justisi bersama instansi terkait," ungkapnya.

Sementara itu Camat Ngampel Sunarto mengatakan kondisi terakhir pasien terpapar di Kecamat-

an Ngampel ada 39 positif, namun saat ini semua sudah sembuh. "Kondisi Kecamatan Ngampel zero

Covid-19, dan kami berharap kondisi ini bisa berlangsung seterusnya," ungkapnya. (Ung)



KR-Unggul Priambodo

TNI dan Polri memandu peragaan cuci tangan yang benar.

HUKUM

DIDAKWA MASUK PEKARANGAN TANPA IZIN Terdakwa: Pembeli Belum Lunasi Pembayaran

YOGYA (KR) - Dua terdakwa pasutri pengusaha Agus Artadi (58) dan Yenny Indarto (58) menyatakan tidak pernah membuat Surat Pernyataan pada 27 September 2018 yang dijadikan barang bukti pelunasan. Mereka tetap bersikukuh pembeli (Yulia dan Gemawan) kurang bayar sebesar Rp 1,5 miliar, sehingga mereka tetap bertahan di tanah/rumah di Jalan Magelang.

"Tidak benar surat pernyataan kecurangan pembayaran telah dilunasi dengan pemberian barang. Hal itu sudah kami laporkan ke Polda. Kami justru yang pertama kali memperingatkan pada pembeli agar segera melunasi jual beli," ucap Agus Artadi dalam sidang agenda pemeriksaan terdakwa di PN Yogya, Kamis (15/10).

Di depan Majelis Hakim dengan Ketua Bandung S SH, kedua terdakwa menyatakan tidak pernah menyetujui harga dituangkan Rp 3 miliar di perkiraan jual beli.

"Saat itu kami hanya manut saja karena terdesak untuk pembayaran utang di bank. Harganya disepakati Rp 6,5 miliar dan membeli hanya punya Rp 3 miliar. Setelah dibalik nama pembeli kemudian dijamin lagi Rp 2 miliar," jelasnya

Kedua terdakwa juga menegaskan

dua BG yang dijadikan barang bukti tidak ada kaitan dengan pembayaran jual beli tanah yang mereka jual. "Semua utang kepada Anton sudah kami lunasi, satu BG yang rekeningnya tidak cukup besok harinya kami penuh. Sedangkan BG satunya lagi telah dilunasi dan diterima saksi Anton," ujarnya.

Sementara penasihat hukum terdakwa, Oncan Poerba SH didampingi Willyam H Saragih SH dan FX Yoga Nugrahanto SH menyebutkan kedua terdakwa sebanyak 4 kali diperiksa di kepolisian, tapi berita acara di persidangan hanya disebutkan 2 kali. "Fotokopi surat bukti peringatan yang tercatat dalam berita acara ternyata tidak ditemukan dalam berkas yang diberikan di persidangan kepada kami," ungkapnya.

Oncan menegaskan Jaksa Edi Budiarto SH yang menjerat kedua terdakwa dengan Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan orang lain tanpa izin pada dua terdakwa tidak bisa dikenakan.

"Kedua Terdakwa sejak semula bertempat tinggal dan menghuni di rumahnya sendiri. Tidak diserahkan kepada pembeli dan tetap bertahan karena pembeli belum melunasi pembayarannya," tegas Oncan. (R-4)

3 Pongeddar Upal Diringkus

BREBES (KR) - Jajaran Polres Brebes berhasil menangkap tiga orang yang diketahui sebagai pengedar uang palsu (upal). Petugas juga mengamankan barang bukti berupa upal senilai 497.300.000. Hingga Jumat (16/10), petugas masih mengembangkan kasus itu.

Para tersangka diketahui bernama Ri (44), Kus (43) dan Sla (42) Ketiganya merupakan warga Cirebon. Petugas juga mengamankan satu unit mobil milik salah satu tersangka yang digunakan untuk tindak kejahatannya itu. "Para tersangka masih kami periksa, untuk kami kembangkan siapa tahu ada pelaku lainnya," ujar Kapolres Brebes AKBP Gatoto Yulianto, Jumat (16/10).

Gatoto mengungkapkan awal ketika

petugas melakukan patroli melihat sebuah mobil terparkir di halaman parkir minimarket Desa Songgom Lor. Petugas langsung menghampiri dan melakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan, salah seorang tersangka merasa ketakutan.

"Saat dilakukan pengecekan di dalam kendaraan, petugas menemukan uang palsu dengan pecahan seratus ribuan sebanyak 4.973 lembar atau senilai 497.300.000," jelasnya.

Menurut Gatoto, diduga para pelaku itu yang selama ini mengedarkan upal di wilayah hukum Polres Brebes. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 36 ayat 2 dan ayat 3 dan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (Ryd)

BERKAS KASUS DILIMPAHKAN KE KEJARI WONOSOBO

Terbangkan Balon Udara, Terancam 2 Tahun Penjara

WONOSOBO (KR) - Direktorat Penyidik Aparatur Sipil Negara (PASN) Kementerian Perhubungan RI akhirnya mengambil langkah tegas dengan memproses hukum para pelaku penerbangan balon udara tradisional yang berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Wonosobo pada perayaan Lebaran lalu.

Berkas perkara kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo, Kamis (15/10) sore. Kepala Direktorat PASN Kementerian Perhubungan RI Rudi Richardo, menyebutkan langkah tegas diambil Kemenhub terhadap para pelaku penerbangan balon udara tradi-

sional secara ilegal sesuai aturan yang berlaku.

Pelaku disangka melanggar Pasal 53 ayat (1) UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

"Kami telah mengeluarkan

aturan yang memungkinkan budaya penerbangan balon udara tetap bisa dilakukan, seperti dengan cara ditambatkan dengan tali yang kuat dengan ketinggian tertentu, sehingga tidak mengganggu aktivitas penerbangan," paparnya.

Kasi Intel Kejari Wonosobo, menegaskan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Direktorat PASN Kemenhub terhadap 4 tersangka penerbangan balon udara telah dinyatakan lengkap (P21) dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Berkas perkara telah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosobo," tandasnya.

Direktur Airnav Indonesia M Pramontohadi Sukarno didampingi Manager Airnav Yogyakarta Ratna Mustikaningsih, mem-

berikan apresiasi terhadap para aparat penegak hukum atas diprosesnya para pelaku penerbangan balon udara ilegal. Penegakan hukum ini bisa memberikan efek jera, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang nekat menerbangkan balon udara secara ilegal.

Penerbangan balon udara ilegal tersebut bukan hanya membahayakan aktivitas penerbangan, tapi juga menjadi ancaman serius jika sampai menutup kabin pilot pesawat atau masuk mesin pesawat. Apalagi langit di Jawa Tengah merupakan jalur sentral yang memiliki aktivitas penerbangan sangat padat.

"Kami mengajak masyarakat pecinta balon udara tradisional di Wonosobo untuk menerbangkan balon udara dengan cara ditambatkan menggunakan tali yang kuat, sehingga tidak mengganggu dan membahayakan aktivitas penerbangan," ungkapnya. (Art)



KR-Ariswanto

Keterangan pers pelimpahan berkas kasus penerbangan balon udara liar.

2 Orang Diduga Bakar Truk Satpol PP

SUKOHARJO (KR) - Dua orang ditangkap petugas Polres Sukoharjo karena diduga membakar truk Satpol PP Sukoharjo. Keduanya diketahui berstatus sebagai karyawan dan pelajar. Proses sekarang sudah masuk tahap penyidikan.

Kepala Satpol PP Sukoharjo Heru Indarjo, Jumat (16/10), mengatakan Satpol PP Sukoharjo masih terus mengikuti perkembangan penanganan kasus pembakaran satu unit truk yang terjadi saat aksi demo menolak keberada UU Cipta Kerja di bundaran tugu Kartasura 8 Oktober lalu.

Hasilnya diketahui sudah ada dua orang diduga pelaku di-

tingkap. Penanganan perkara diserahkan sepenuhnya kepada pihak Polres Sukoharjo.

"Ada dua orang diduga pelaku pembakar truk milik Satpol PP Sukoharjo saat aksi demo di bundaran tugu Kartasura. Proses sekarang sudah penyidikan dan ditangani sepenuhnya oleh Polres Sukoharjo," ujarnya.

Kedua orang diduga pelaku tersebut masih terus dimintai keterangannya oleh polisi. Satpol PP Sukoharjo juga masih dilibatkan dalam penanganan dengan beberapa orang saksi dimintai keterangan.

"Pada saat kejadian sopir atau anggota Satpol PP Sukoharjo berada didalam truk dan tahu terjadi-

an. Saat itu ada pergerakan massa berlarian setelah ada tembakan gas air mata, selang tidak lama truk Satpol PP Sukoharjo dibakar," lanjutnya.

Heru menambahkan, kasus pembakaran truk operasional milik Satpol PP Sukoharjo sudah ditangani Polres Sukoharjo. Polisi sudah bergerak melakukan pendataan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Selain itu sekarang sedang melakukan penyelidikan terkait pelaku pembakaran.

"Ada rekaman CCTV lengkap dan terlihat jelas setiap gerakan dari awal pergerakan truk operasional Satpol PP Sukoharjo hingga pembakaran," lanjutnya. (Mam)